

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semua perusahaan berupaya mempertahankan kelangsungan usahanya agar dapat terus beroperasi. Kelangsungan usaha dapat tercapai karena kerja sama yang baik antara pemilik dana (prinsipal) dan manajemen (agen). Sebagai pemilik dana, pemegang saham berhak atas pertanggungjawaban manajemen terkait kinerja perusahaan dan keputusan kebijakan yang diambil oleh manajemen karena manajemen merupakan pengelola perusahaan yang memegang kendali atas operasi bisnis. Manajemen akan memenuhi kewajibannya dengan menyajikan laporan keuangan sebagai media komunikasi dan pertanggungjawaban atas kinerja dan kebijakan yang pilihannya kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Laporan keuangan yang relevan dan andal akan membantu perusahaan mendapatkan dana karena mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Dana yang diperoleh perusahaan akan diinvestasikan pada aset lancar maupun aset tetap yang berguna untuk mendukung operasi perusahaan. Aset lancar adalah kas dan aset lain yang dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam satu tahun atau satu siklus operasi, yang mana yang lebih panjang (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2014:184). Berbeda dengan aset lancar, aset tetap tidak memenuhi kriteria tersebut. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) Nomor 16, aset tetap merupakan aset berwujud yang: (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2017). Aset tetap digunakan perusahaan dalam periode yang panjang sehingga diperlukan peraturan khusus dalam pencatatan aset tetap.

Pada pengakuan awal, aset tetap diukur sebesar biaya perolehan, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aset tetap hingga aset siap digunakan. Kemudian pada pengukuran setelah pengakuan awal, aset tetap dapat diukur dengan model biaya (IAI, 1994). Dengan model biaya, aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Model ini memiliki kelebihan dalam hal keandalan karena nilainya diperoleh dari transaksi dimasa lalu sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan bukti transaksi yang dapat diverifikasi. Namun model biaya dinilai kurang relevan karena nilai tercatat aset tetap akan berbeda dengan nilai pasar aset sekarang. PSAK Nomor 16 (1994) menyatakan revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena menggunakan harga perolehan, namun penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah (IAI, 1994). Hal ini menunjukkan bahwa revaluasi aset tetap dapat dilakukan untuk tujuan perpajakan sesuai peraturan pemerintah dan tidak terdapat uraian lebih lanjut terkait revaluasi aset tetap dalam PSAK Nomor 16. Namun sejak konvergensi *International Financial Reporting Standards* (IFRS),

PSAK Nomor 16 (revisi 2007) mengadopsi *International Accounting Standards (IAS) Nomor 16 (2003)* dan memberikan pilihan kebijakan akuntansi terkait pengukuran setelah pengakuan awal aset tetap, yaitu model biaya dan model revaluasi. Dengan model revaluasi, aset tetap disajikan sebesar nilai wajar saat revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Model revaluasi mampu mengatasi kelemahan model biaya karena model revaluasi dinilai dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aset. Revaluasi aset tetap dalam praktiknya mencatat aset menggunakan nilai pasar dari aset tersebut, sehingga nilai aset menjadi relevan (Yulistia, Fauziati, Minovia, dan Khairati, 2015).

Walaupun dinilai lebih relevan karena mampu menunjukkan nilai aset yang sebenarnya, sebagian besar perusahaan di Indonesia masih menggunakan model biaya. Sejak PSAK Nomor 16 (revisi 2007) berlaku efektif, hanya lima perusahaan manufaktur yang melakukan revaluasi pada tahun 2008, sedangkan pada tahun 2009 hanya terdapat tiga perusahaan manufaktur yang melakukan revaluasi (Yulistia dkk., 2012a; dalam Yulistia dkk., 2015b). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan di Indonesia masih enggan memilih model revaluasi karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk merevaluasi aset tetap, seperti biaya pajak dan biaya *appraisal*. Ketika melakukan revaluasi, surplus revaluasi yang muncul merupakan objek pajak penghasilan dan dikenai PPh final sebesar 10% (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 Pasal 5). Biaya lain, yaitu biaya *appraisal*, menjadi biaya yang harus dikeluarkan perusahaan karena berdasarkan

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor 347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, perusahaan publik yang memilih model revaluasi harus menggunakan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Properti (KJPP) yang terdaftar di Bapepam dan LK.

Hingga tahun 2015, terdapat 20 perusahaan manufaktur yang menggunakan model revaluasi (Purnamasari, 2017). Peningkatan ini menunjukkan semakin banyak perusahaan manufaktur yang memahami pentingnya menyajikan laporan keuangan yang relevan. Pemilihan model revaluasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: kontrak utang, biaya politik, dan asimetri informasi (Yulistia dkk., 2015; Andison, 2015; Seng dan Su, 2010; Tay, 2009).

Faktor pertama yaitu kontrak utang adalah perjanjian antara debitor dan kreditor yang bertujuan untuk melindungi kreditor dari risiko *default*. Salah satu bentuk perjanjian ini adalah batasan-batasan (*threshold*) rasio keuangan yang harus dipatuhi oleh debitor. Semakin dekat perusahaan dengan batasan kontrak utang, semakin tinggi pula risiko yang dihadapi perusahaan karena berpeluang besar melanggar perjanjian kontrak utang. Manajemen akan berupaya agar tidak terjadi pelanggaran perjanjian kontrak utang dengan memilih kebijakan akuntansi yang mampu memperbaiki rasio tersebut. Perusahaan yang berpeluang besar melanggar perjanjian kontrak utang akan memilih model revaluasi sehingga pelanggaran kontrak utang dapat dihindari (Seng dan Su, 2010).

Faktor kedua yaitu biaya politik merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memenuhi tuntutan pihak eksternal, seperti pemerintah dan serikat buruh terhadap perusahaan. Biaya politik yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan perhatian politik yang tinggi dari pihak eksternal, di mana hal ini biasanya dialami oleh perusahaan besar. Berdasarkan hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*), perusahaan besar akan cenderung memilih kebijakan akuntansi yang menurunkan laba untuk mengurangi perhatian politik (Watts dan Zimmerman, 1990). Perusahaan dengan biaya politik tinggi akan berusaha mengurangi laba, salah satunya dengan memilih model revaluasi yang menyebabkan peningkatan biaya depresiasi. Penurunan laba ini diharapkan mampu mengurangi perhatian politik yang diberikan pihak eksternal terhadap perusahaan (Lin dan Peasnell, 2000; dalam Seng dan Su, 2010).

Faktor ketiga adalah asimetri informasi yaitu ketika pihak internal memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak eksternal. Asimetri informasi tersebut dapat dikurangi ketika perusahaan menyajikan informasi sebenarnya yang tidak diketahui pihak eksternal. Dalam rangka mengurangi asimetri informasi, manajer akan cenderung memilih model revaluasi karena lebih relevan dan menyajikan nilai aset tetap dengan lebih jujur (*relevant and faithful representation*). Dengan memilih menggunakan nilai wajar, perusahaan bertujuan menunjukkan nilai perusahaan sesungguhnya (*true value*) untuk mengurangi asimetri informasi (Farahmita dan Siregar, 2014).

Keputusan memilih model revaluasi aset tetap dalam laporan keuangan akan menjadi informasi bagi pihak eksternal (Andison, 2015). Informasi ini berpeluang menimbulkan respons pasar karena revaluasi aset tetap akan menunjukkan nilai aset yang sebenarnya dan meningkatkan nilai aset perusahaan. Berdasarkan hipotesis pasar efisien, informasi yang bermanfaat akan direspons oleh pasar dan tercermin dari perubahan harga saham (Bandi dan Hartono, 1999). Jika keputusan revaluasi berguna dan disukai oleh pemegang saham, maka pemegang saham akan memberikan respons positif sehingga harga saham meningkat. Informasi revaluasi dapat memberikan sinyal kepada investor bahwa mereka memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan atas investasinya, baik dalam bentuk *return* maupun *abnormal return* (Andison, 2015). Oleh sebab itu dilakukanlah uji tambahan untuk menguji adanya perbedaan respons pasar pada perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap dan tidak melakukan revaluasi aset tetap.

Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2016. Perusahaan manufaktur digunakan sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur memiliki proporsi aset tetap yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya sehingga pemilihan model revaluasi akan mempengaruhi nilai aset di laporan posisi keuangan secara material. Penelitian dimulai pada tahun 2012 karena tahun 2012 konvergensi IFRS telah diberlakukan dan diterapkan secara penuh di Indonesia. Penelitian ini diakhiri pada tahun 2016 agar hasil penelitian lebih relevan dengan keadaan saat ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian adalah: “Apakah kontrak utang, biaya politik, dan asimetri informasi berpengaruh terhadap keputusan revaluasi aset tetap pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2016?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kontrak utang, biaya politik, dan asimetri informasi terhadap keputusan revaluasi aset tetap pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, sebagai acuan bagi penelitian berikutnya dengan topik sejenis yaitu pengaruh kontrak utang, biaya politik, dan asimetri informasi terhadap keputusan revaluasi aset tetap pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2016.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai bahan pertimbangan bagi investor agar mempertimbangkan pengaruh kontrak utang, biaya politik, dan asimetri informasi terhadap keputusan revaluasi aset tetap

dalam rangka mengambil keputusan investasi sehingga dapat memaksimalkan *return*.

- b. Sebagai masukan bagi Dewan Standar Akuntansi Keuangan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi revaluasi aset tetap sehingga dapat digunakan sebagai masukan untuk revisi PSAK Nomor 16 di masa depan dalam hal pengungkapan dampak revaluasi aset tetap atas kontrak utang, biaya politik, dan asimetri informasi.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu; landasan teori tentang teori akuntansi positif, kontrak utang, biaya politik, asimetri informasi, aset tetap, revaluasi aset tetap, dan respons pasar; pengembangan hipotesis; dan model analisis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik

pengambilan sampel, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang bermanfaat bagi peneliti berikutnya.